



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 1 NOMOR 2 JUNI 2018

CURRICULUM 2013 IN RELATION TO EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: WHY, WHAT, AND HOW

Rusli

TINJAUAN KRITIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK BAGI KADER PARPOL

Hasan Hanafi

PEMIKIRAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN IKHWANUL MUSLIMIN PASCA MUSIM SEMI ARAB

Syawaluddin

OPTIMALISASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Hikmah

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERDASARKAN PENDEKATAN SAINTIFIK KURIKULUM 2013 DI KELAS VII MTS DDI JOLLE

Kasmah & Syamsir Bin Rukka

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Restu Rahmawati



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**OPTIMALISASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

Hikmah

Jurusan Ekonomi, Fakultas ekonomi, Universitas Putera Batam,
Indonesia

hikmah@puterabatam.ac.id

Abstrak

Lahirnya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia. Satu sisi otonomi menjadi peluang bagi satuan pendidikan untuk mengelola sekolah sendiri baik dalam aspek pengembangan kurikulum maupun aspek pendanaan, namun di sisi lain menjadi ancaman manakala sekolah tidak memiliki kesiapan baik dari segi sumberdaya manusianya (SDM) maupun pembiayaannya, oleh karena itu kompetensi kepala sekolah dalam manajemen keuangan sekolah mutlak diperlukan sehingga baik guru maupun karyawan dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: *Manajemen, Keuangan, Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai. Untuk itu kecukupan pendanaan (keuangan) adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan pendidikan yang bermutu. Namun banyaknya sumber pendanaan tidak menjadi jaminan kualitas pendidikan manakala tidak dikelola dengan baik. Untuk itu manajemen keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Mujammil Qomar keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang di pimpinnya.¹ Dalam undang-undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.²

Selanjutnya pada pasal 49 ayat 3 juga dinyatakan bahwa dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Ketersediaan dana yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak mustahil pemborosan, ketidak sesuaian belanja dengan rencana atau bahkan penyelewengan dana bisa saja terjadi, untuk itu perencanaan yang baik, kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan dan pertanggung jawaban perlu di manajemen dengan baik. Untuk itu, dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut berkenaan dengan konsep manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan dan sumber-sumber keuangan pendidikan.

¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 163

² Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fattah Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain.⁴ Sementara itu Sulistiyorini memaknai manajemen keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Sementara itu dalam arti luas manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kepengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.⁵ Senada dengan sulistiyorini, David Wijaya menyebutkan, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangansekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.⁶

Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau ketata usahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan. Menurut

⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 78.

⁵ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Elkaf, 2006), h. 98.

⁶ David Wijaya, *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur, 2009), h. 82-83.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, 2003), h. 34.

Bafadal dalam Agustinus Hermino manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai berikut: (1) perencanaan anggaran tahunan, (2) pengadaan anggaran, (3) pendistribusian anggaran, (4) pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan keuangan, (6) pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.⁸ Selanjutnya menurut Agustinus, fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni: menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni (1) Kepala sekolah; data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan, (2) Guru dan Karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pension dan peluang kerja, (3) kreditur, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat di bayar manakala jatuh tempo, (4) orang tua siswa; bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah, (5) pemasok (supplier). Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo, (6) pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya, (7) masyarakat. Membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.⁹

Menurut Sulistiyorini, Fokus manajemen keuangan pendidikan adalah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memfungsikan masyarakat untuk terlibat aktif berpartisipasi mengelola sekolah.¹⁰

B. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Arwidayanto dkk, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau

⁸ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 186

⁹ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 186

¹⁰ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 56.

perencanaan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Anggaran (Budgeting)

Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.¹¹

Dalam penyusunan anggaran pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelola keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Hemat sesuai dengan kebutuhan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, (3) tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar.

2. Pembukuan (Accounting)

Pembukuan (accounting) dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal: Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Berikut ini beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah: buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, neraca percobaan.

3. Pemeriksaan (auditing)

¹¹ Arwildayanto dkk, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan : Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo* (Padjajaran: Widya, 2017), h. 24.

Pemeriksaan. (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing yakni: (1) pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. (2) pemeriksaan (audit) operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: (1) kepala dinas pendidikan, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.¹²

C. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹³ Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.¹⁴

1. Pemerintah

¹² Arwildayanto dkk, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan : Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo* (Padjadjaran: Widya, 2017), h. 24.

¹³ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁴ Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 130.

Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Dana dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta didik kelas I, II, dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan anggaran tersebut. Selain DIK pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah.

2. Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) Dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. (2) Dana incidental merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. (3) Dana sukarela. Adalah pendanaan yang diberikan secara suka rela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik.

3. Masyarakat

Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya suka rela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.

4. Dana dari alumni

Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai

bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini dapat diterima dari alumni yang diberikan secara langsung oleh individu maupun kelompok baik melalui acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.

5. Dana Dari Peserta Kegiatan

Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Seperti kegiatan yang diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diinginkan peserta didik seperti kegiatan pengembangan diri tata boga, tata busana, pramuka, dan lain- lain.

6. Dana Dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru, dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.

D. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan

1. Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan.

Selain itu transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan disebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan

melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media online web site lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku pihak sekolah membelajarkan uang secara bertanggung jawab. Ada tiga syarat utama untuk terciptanya

akuntabilitas public yakni: (1) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (2) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan, dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat.

3. Efektivitas

Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Kompri mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi misi lembaga.¹⁵ Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomenya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan

¹⁵ Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik

(input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dilihat dari segi hasil kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁶ (1) Prinsip keadilan. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu : besarnya pendanaan pendidikan, (dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (2) Prinsip Efisiensi, mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan hasil. (3) Prinsip transparansi, artinya menekankan adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari segi sumber keuangan pendidikan, jumlahnya, rincian kegunaannya, maupun pertanggung jawabannya. Secara keseluruhan harus jelas dan sesuai dengan kenyataannya dan pelaksanaannya. (4) prinsip akuntabilitas publik. Artinya penggunaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggung jawabkan, pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan.¹⁷

E. Tugas pengelola keuangan

Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban.¹⁸

¹⁶ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁷ Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan, h. 184.

¹⁸ Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran.

Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga pemanfaatan dana. Berikut ini diantara beberapa tugas manajer keuangan sekolah: (1) Manajemen untuk perencanaan perkiraan, (2) manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, (3) manajemen kerjasama dengan pihak lain, (4) penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya.¹⁹

F. Proses Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan anggaran

Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Menurut Terry dalam Syarifudin mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.²⁰

Selanjutnya menurut E. Mulyasa, perencanaan financial yang disebut budgeting adalah kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia

¹⁹ Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik. 158-159.

²⁰ Syafaruddin, Manajemen Lemabaga Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 14.

untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.²¹

Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya, hendaknya kepala sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Berdasarkan jenisnya, sumber pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yakni (1) Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Misalnya: Anggaran Rutin (DIK), anggaran operasional, pembangunan dan perawatan (OPF), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (2) Wali peserta didik, misalnya SPP. (3) Masyarakat, misalnya: sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lain-lain.

Untuk dapat menggerakkan sumber-sumber pendanaan tersebut, peran kepala sekolah untuk menyusun perencanaan yang baik mutlak diperlukan. Pentingnya perencanaan yang baik telah digambarkan di dalam al-Qur'an surat al-Hasyr :18-19 berikut ini.

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S.al-Hasyr: 18-19).

Dalam tafsir jalalain ayat tersebut ditafsirkan, (Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).²² Dari sini dapat pula dipahami bahwa dalam manajemen keuangan pendidikan, perencanaan yang baik adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan, lebih-lebih di era teknologi seperti saat ini

²¹ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.48.

²² Aplikasi-Terjemah tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat-myface.blogspot.com

dimana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar peserta didik, perkembangan pendidikan yang dinamis menuntut seluruh pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri agar tetap survive di tengah-tengah persaingan yang semakin berat. Namun jika direncanakan dengan baik semua ujian akan terasa ringan karena sudah disiapkan dengan baik.

2. Strategi mencari sumberdana sekolah

Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan, dengan pendanaan yang ada kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan di capai. Berikut ini di antara strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah:

Pertama, Membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap survive dengan membangun usaha-suaha sekolah seperti pengembangan usaha koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dipilih oleh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis untuk menggali sumber pembiayaan sekolah, karena tidak hanya terbatas pada penyediaan barang saja berupa penyediaan perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti foto kopi, bus antar jemput sekolah, penyediaan layanan jasa sewa ruko, rumah kos dan lain-lain. Dengan pengelolaan serta manajemen yang tepat tidak mustahil sekolah mampu memiliki kemandirian secara financial bahkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Kedua, Membuka kursus (kegiatan luar sekolah). Penyelenggaraan kegiatan berupa layanan kursus merupakan salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan sekolah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Kegiatan sifatnya terbuka untuk umum tidak diwajibkan bagi siswa. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat umum (luar sekolah |) sebagai peserta. Kegiatan ini selain mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk mengenali potensi yang dimiliki masing-masing siswa, kegiatan ini juga mampu menggali pembiayaan pendanaan sekolah untuk mencapai kemandirian pembiayaan. Di antara contoh-contoh bentuk usaha yang dapat

dikembangkan dalam bentuk usaha kursus adalah : (1) kursus bahasa baik bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain, (2) kursus computer, (3) membuka kelas tari atau pencak silat, kursus tata busana, (4) kursus tata boga dan lain-lain.

Ketiga, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Namun pengajuan dana kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta merta dan disetiap saat.

Keempat, penggalangan dana dari para donatur. Sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur tetap maupun tidak tetap.

Kelima, penggalangan dana dari para alumni. Penggalian dana dari para alumni yang sudah sukses bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap survive. Penggalangan dana bisa bersifat tetap dan bisa juga tidak tetap.

Keenam, Dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Sumber pembiayaan dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.

3. Penggunaan keuangan sekolah

Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Dalam Widjanarko, M DAN Suhertian, P.A disebutkan, staf yang dipilih untuk mengelola keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut: pembukuan, peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pimpinan, memahami bahwa bertugas dibidang keuangan merupakan

pelayanan, tanggap terhadap tugas, dan memahami bahwa kurang tanggapnya dalam bekerja akan mengurangi kelancaran pencapaian tujuan.²³

Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No.585/K/1987 dan 590/kmk 03/03/1987 tanggal 24 September 1987 kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk: pemeliharaan sarana dan prasarana, PBM /KBM, pembinaan kegiatan siswa, dukungan kegiatan personil, kegiatan R.T Sekolah/ Komite sekolah.

4. Pengawasan dan evaluasi anggaran

Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program- program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manager sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Menurut Komaruddin langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut: (1) pengembangan standar. Pengawasan dimulai dengan mengembangkan batasan atau rincian strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. (2) pengukuran pelaksanaan, adalah kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada perencanaan yang telah ditetapkan. (3) penilaian pelaksanaan, adalah kegiatan menentukan makna terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap keuangan sekolah. (4) perbaikan. Merupakan kegiatan yang mengupayakan penyesuaian-penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan yang telah terjadi.²⁴

5. Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah

Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan

²³ Widjanarko, M dan Suhertina, P.A, 1996/1997, Manajemen Keuangan Sekolah, Bahan Pelatuhan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se Indonesia di Malang

²⁴ Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.88

dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya.

Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, semakin baik kondisi keuangan sekolah maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah.

C. KESIMPULAN

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu substansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah dapat dimaknai sebagai upaya kepengurusan atau ketatausahaan keuangan mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu mendanai pembiayaan sekolah, namun sekolah juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan manajemen yang baik pula tidak mustahil bagi sekolah memiliki kemandirian pendanaan, dapat memberdayakan masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kepala sekolah, bendahara dan staf dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Manajemen keuangan yakni: (1) transparan, (2) akuntabilitas, (3) efektif (4) efisien. Selain itu pengelola keuangan juga dituntut untuk mampu menguasai ruang lingkup manajemen keuangan sekolah yakni: Perencanaan anggaran, (2) mencari sumber dana sekolah, (3) penggunaan keuangan sekolah, (4) pengawasan dan evaluasi anggaran, (5) pertanggung jawaban keuangan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Aplikasi-Terjemah tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat-myface.blogspot.com.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Arwildayanto dkk. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan : Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan

dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Padjadjaran: Widya. 2017.

Agustinus Hermino. *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning*. Jakarta: Gramedia. 2013.

David Wijaya. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur. 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen. Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama. 2003.

Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Kompri. *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*. Jakarta: Kencana. 2017.

Mujamil Qomar. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Nur Aedi. *Pengawasan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.

Nur Komariah Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Elkaf. 2006. Syaiful Sagala. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Syafaruddin. *Manajemen Lemabaga Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press. 2005.

Widjanarko. M dan Suhertina, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah. Bahan Pelatuhan Manajemen Pendidikanbagi Kepala SMU se Indonesia di Malang*.